

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Karakteristik Pohon di Taman Nasional Gunung Leuser pada Resort Sei Betung yang berstatus hutan konservasi dengan luas wilayah $\pm 10.048,38$ Ha. Karakteristik tinggi pohon yang berada di Resort Sei Betung melalui 9 plot sampel dengan jumlah pohon keseluruhan 85 pohon dikategorikan berada pada kelas pohon rendah karena tidak lebih dari 20 meter, banyak terdapat pada kelas stratum C. Karakteristik diameter batang pohon di Resort Sei Betung di kategorikan kedalam kelas pohon inti.
2. Tingkat Kerapatan Pohon di Taman Nasional Gunung Leuser pada Resort Sei Betung tidak lebih dari 50% jika dilihat dari persentase tingkat kerapatan relatif. Tingkat kerapatan tutupan tajuk pohon di Resort Sei Betung dari 9 plot dengan hasil 7 plot sampel termasuk kedalam tutupan tajuk pohon rapat sedangkan 2 plot sampel tidak memiliki tutupan tajuk pohon. Tingkat tutupan tajuk secara keseluruhan pada hutan Resort Sei Betung berdasarkan data pengukuran lapangan dan tabulasi nilai *NDVI* melalui perhitungan *regresi linear* dengan nilai (*R*) sebesar 0,825 sehingga memiliki arti antara variabel (*x*) dan (*y*) memiliki keterkaitan. Resort Sei Betung dikategorikan kedalam tutupan tajuk rapat seluas 7.478,82 Ha, sedangkan tutupan tajuk pohon yang termasuk kedalam kategori sedang seluas 0,27 Ha.
3. Penyebab tingkat kerapatan dan tutupan tajuk termasuk kedalam kelas jarang dibuktikan dengan adanya data lapangan yang menunjukkan

kegiatan perambahan dilakukan oleh oknum, sehingga mengurangi jumlah pohon. Bentuk perambahan dilatarbelakangi karena tidak jelasnya tata batas kawasan hutan. Masyarakat tidak paham mengenai kebijakan pemerintah terkait tata ruang hutan dan target perencanaannya setiap tahun.

B. Saran

1. Karakteristik pohon hutan di Resort Sei Betung termasuk kedalam kelas rendah dan kecil sehingga diharapkan dalam upaya penyelamatan hutan dengan kegiatan restorasi dapat menanam pohon hutan dengan jenis pohon yang heterogen agar karakteristik pohon di Resort Sei Betung beragam.
2. Tingkat kerapatan pohon dan tutupan tajuk pohon yang jarang harus ada upaya penjagaan kawasan hutan dari eksploitasi hutan. Eksploitasi yang terjadi dikawasan hutan merupakan salah satu pemicu berkurangnya kerapatan dan tutupan tajuk pohon di Resort Sei Betung. Tingkat kerusakan hutan yang terjadi di Resort Sei Betung merupakan konflik yang harus ditangani dengan media yang tepat. Program pemerintah membagi lahan seluas 12,7 juta Ha yang termasuk kedalam kawasan hutan tanpa hak milik tetapi hanya hak guna. Hutan yang bagaimana yang akan dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu hutan yang sudah rusak dan hutan yang dikuasai oleh oknum yang tidak memiliki izin.
3. Penyebab kerusakan hutan karena aktifitas penggarapan dapat diminimalkan melalui program pembagian lahan oleh pemerintah kepada masyarakat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. 83 tahun 2016. Pembagian hutan tanpa hak milik

dapat digunakan jalur pengusulan hutan desa, Pengusulan hutan kemasyarakatan, pengusulan hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan kementerian kehutanan dan hutan adat. Upaya pemulihan hutan di Resort Sei Betung cocoknya menggunakan langkah kemitraan antara masyarakat kesultanan Langkat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Daerah Resort Sei Betung dan resort lainnya yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Langkat menurut pemangku tapak yaitu daerah ulayat dari kesultanan Langkat.

Langkah kemitraan, masyarakat dapat bercocok tanam dengan kategori tanaman hutan dan masyarakat dapat mengambil keuntungan dari yang ditanamnya tanpa menjadikan daerah bercocok tanamnya sebagai hak milik. Apabila program ini mampu di usulkan oleh masyarakat kesultanan Langkat dan dapat direalisasikan oleh pemerintah maka kawasan hutan yang rusak mampu hijau kembali dan masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap penjagaan kelestarian hutan Resort Sei Betung yang didukung oleh pemerintah yang terus melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan pemetaan partisipatif terhadap batas kawasan hutan yang melibatkan masyarakat.